



**SELASA, 15 JANUARI 2019**

**SUMBER BERITA**

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Dewan Panggil Dishub, Minta Kejelasan Soal Lampu Jalan**

**BENGKULU** - Polemik dugaan indikasi kerugian negara dalam proyek pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bengkulu tahun 2017 lalu, tampaknya bakal berbuntut panjang. Pasalnya DPRD Kota Bengkulu akan menjadwalkan pemanggilan pihak terkait.

"Ya rencananya akan kita agendakan pemanggilan pihak terkait (Dishub, red) kita akan pertanyakan kejelasan soal lampu jalan itu. Salah satunya termasuk penyelesaian atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu sejauh mana oleh pihak Dishub,"

kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota, Indra Sukma, kemarin (14/1).

Diungkapkan Indra, program Pemerintah Kota menjadikan Kota Bengkulu terang benderang harus didukung penuh. Ia menilai pemasangan lampu jalan yang dilakukan tahun 2017 lalu tersebut merupakan program yang sangat baik dan didukung masyarakat. "Jadi ketika OPD terkait tidak bisa menjalankan program itu dengan baik, maka harus dilakukan evaluasi. Mengingat pak walikota menginginkan Kota Bengkulu ini menjadi kota yang terang benderang.

☞ Baca *DEWAN.. Hal 19*

**Sambungan dari hal 9**

Tentu OPD terkait harus mendukung penuh program Pemkot tersebut," ungkapnya.

Senada disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota, Iswandi Ruslan. Ia mengungkapkan, pemanggilan pihak Dishub mempertanyakan soal kejelasan lampu jalan itu wajib dilakukan. Sebab sampai saat ini pihaknya belum mengetahui persis keberadaan lokasi pemasangan lampu jalan tahun 2017 lalu, yang hingga saat ini menjadi temuan BPK.

"Bahkan kita juga belum mengetahui persis apakah temuan itu diselesaikan apa belum oleh OPD terkait (Dishub). Makanya penting kita minta klarifikasi secara jelas oleh OPD terkait itu agar tidak selalu menjadi tanda tanya," ujar

Iswandi.

Selain itu, lanjut Iswandi, pihaknya menyayangkan apabila pengadaan lampu jalan yang menghabiskan uang miliaran rupiah tersebut ternyata menimbulkan masalah atas temuan BPK RI. Sebab menurutnya, penerangan jalan di lingkungan sangat penting guna mengurangi kasus tindak kejahatan seperti perampokan. Oleh karena itu Dishub yang sudah mendapat tugas perbaikan lampu jalan harus tanggung jawab karena warga diwajibkan bayar pajak.

"Dishub juga jangan hanya sekedar bisa mengelola anggaran pemasangan lampu jalan saja ketika ada proyeknya. Namun juga harus selalu rutin mengecek tiap lampu jalan yang mati. Kalau rusak segera diperbaiki secepatnya,

mengingat lampu jalan sangat penting bagi masyarakat. Apalagi Kota Bengkulu ini merupakan ibukotanya Provinsi Bengkulu," jelasnya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Drs. Bardin belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi beberapa kali ponsel pribadinya tidak aktif.

Dilansir RB sebelumnya, Adanya dugaan indikasi kerugian negara dala proyek pengadaan dan pemasangan LPJU di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bengkulu tahun 2017, menjadi sorotan DPRD Kota Bengkulu. Aparat penegak hukum pun diminta turun untuk melakukan pengusutan. Terlebih lagi berdasarkan temuan BPK, indikasi kerugian negara tidak sedikit, hampir Rp 1 miliar yakni Rp 950,76 juta. **(new)**